

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN RUTIN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI KOTA MAKASSAR**

Ismail

STIK Gunung Sari Makassar

Email : ismail_syamsuddin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran rutin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar selama lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012. Variabel penelitian ini adalah pengelolaan anggaran rutin.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah keseluruhan data laporan keuangan yang menyangkut penerimaan dan realisasi anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan sampelnya adalah data dan target realisasi anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada lima tahun terakhir yaitu 2008 sampai dengan 2012. Pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan anggaran dengan realisasi kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori tingkat efisiensi dan efektifitas tertentu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar selama lima tahun terakhir yaitu 2008 sampai dengan 2012 tidak efisien dan tidak efektif dalam mengelola anggaran rutinnya walaupun dalam penggunaan anggarannya tidak sama atau tidak melebihi anggaran yang diterima karena masih ada program kegiatan yang belum terlaksana.

Kata Kunci : Pengelolaan Anggaran Rutin

**ANALYSIS OF MANAGEMENT OF REGULAR BUDGET
IN ELECTION COMMISSION SOUTH SULAWESI PROVINCE
IN MAKASSAR**

Ismail

STIK Gunung Sari Makassar

Email : ismail_syamsuddin@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this study is to determine efficient and effective management of the regular budget of the Election Commission of South Sulawesi in city of Makassar during the five years that the budget fiscal year 2008 to 2012. The variables of this study is the management of the regular budget.

This study is a descriptive research. The study population was overall financial statement data about acceptance and realization of the regular budget of the Election Commission of South Sulawesi Province, and the sample data and the target is the realization of the regular budget of the Election Commission of South Sulawesi province in the last five years ie 2008 to 2012. Data were collected through interviews and documentation. The technique of data analysis is done by comparing the budget with the actual receipt is then interpreted into the category of a certain level of efficiency and effectiveness.

The results of this study concluded that the management of the regular budget of the Election Commission of South Sulawesi in city of Makassar during the last five years, ie 2008 to 2012 is inefficient and ineffective in managing the use of regular budget although the budget does not equal or exceed the budget received because there is still a program of activities that has not been done.

Key Words : Management of Regular Budget

PENDAHULUAN

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan mempunyai organisasi sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Agar dapat menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, pemerintah daerah dan organisasi sektor publik yang berada di daerah tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit yang merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Tujuan utama dari organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat (*public service*). Sebagai konsekuensi dari fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi sektor publik juga memerlukan sumber daya. Cara pengelolaan sumber daya untuk pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya untuk pembangunan masyarakat dituntut menjadi lebih baik sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dalam pengelolaan anggaran dan belanja rutin dalam organisasi pemerintahan.

Salah satu anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu anggaran rutin yang diperuntukkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan adalah anggaran operasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran operasional KPU Sulawesi Selatan hanya dapat dimanfaatkan selama satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi KPU Sulawesi Selatan. Pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional KPU Sulawesi Selatan antara lain belanja Administrasi Umum (seperti pembayaran gaji pegawai) , Belanja Operasional (perlengkapan alat tulis kantor) dan Pemeliharaan (kantor, kendaraan).

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab sebagai suatu organisasi publik yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan anggaran rutinnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Anggaran pengelolaan program dan kegiatan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari dua sumber yaitu bersumber dari APBN Murni dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan pengelolaannya harus dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk mengetahui efisien dan efektifnya pengelolaan anggaran dapat dilihat dalam 4 hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu perencanaan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran. Pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan cenderung menunjukkan adanya beberapa kelemahan, baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.

Berikut ini peneliti akan menampilkan data sekunder tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin yang telah dikelola oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.
Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di Kota Makassar periode 2008 – 2012

Tahun Anggaran	Penerimaan Anggaran (Rp)	Pengeluaran Anggaran (Rp)
2008	1.915.398.000	1.721.111.266
2009	2.364.713.000	2.010.591.448
2010	4.819.815.000	2.572.562.113
2011	3.757.806.000	3.363.136.830
2012	7.397.468.000	4.169.729.539

Sumber : KPU Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

Pada tabel di atas anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Dan terlihat pada tahun 2010 dan 2012 terjadi penggunaan anggaran yang rendah. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Maka peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu : Analisis Pengelolaan Anggaran Rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar telah dikelola secara efisien dan efektif?.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel merupakan indikator terpenting yang menentukan keberhasilan suatu penelitian, sebab variabel penelitian adalah objek penelitian atau titik perhatian dalam suatu penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini terdiri atas variabel tunggal atau mandiri yaitu pengelolaan anggaran rutin dengan 4 (empat) sub variabel yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merubah suatu keadaan tertentu secara efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat lebih berkembang melalui usaha-usaha yang berintikan perencanaan, pengaturan, pengorganisasian dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Anggaran Rutin adalah suatu rencana pembiayaan yang diberikan setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pemerintah sehari-hari, dikeluarkan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengelolaan Anggaran Rutin adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengolah rencana pembiayaan guna untuk kelancaran kegiatan sehari-hari berintikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dapat diketahui melalui perbandingan antara target dan realisasi yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori persentase tertentu.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Menurut Sugiyono (2009 : 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka populasinya adalah keseluruhan data laporan keuangan yang menyangkut penerimaan dan realisasi anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Sampel

Menurut Usman (2001 : 4), sampel ialah sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data dan target realisasi anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada lima tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2008-2012.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku tempat penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen, literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, guna mendapatkan data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang berhubungan dengan teori-teori tentang pengelolaan anggaran rutin.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi dari Anggaran Rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun anggaran yang dianalisa digunakan rumus yang dikemukakan oleh Syamsi (1983 : 199-200) sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$TE. AR_{(t)} = \frac{T_{(t)}}{R_{(t)}}$$

Dimana :

- TE. AR_(t) : Tingkat efisiensi Anggaran Rutin pada tahun t
- T_(t) : Target anggaran pada tahun t
- R_(t) : Realisasi anggaran pada tahun t

Dari hasil perhitungan di atas tingkat efisiensi dapat disesuaikan dengan ranking efisiensi sebagai berikut :

- TE. AR > 1 dikategorikan sangat efisien
- TE. AR = 1 dikategorikan efisien
- TE. AR < 1 dikategorikan tidak efisien

2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran rutin dapat dilihat dari sasaran utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam laporan keuangan yang telah dilaksanakan.

3. Adapun indikator dari efisien dan efektif yaitu apabila semua kegiatan yang direncanakan sebelumnya telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran serta tidak melebihi dari anggaran yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar. Anggaran yang terdapat di KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari anggaran rutin dan anggaran yang sifatnya 5 tahun sekali (seperti anggaran legislatif, pilkada, dsb). Yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu anggaran rutin dengan menggunakan variabel tunggal yaitu Pengelolaan Anggaran Rutin, yang selanjutnya diuraikan dalam sub variabel sebagai berikut :

1. Perencanaan;
2. Pengorganisasian;
3. Pelaksanaan;
4. Pengawasan;

Keempat sub variabel tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam indikator-indikator penelitian yang akan penulis uraikan berikut ini :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan awal pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan perencanaan dibutuhkan dukungan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran. Data dan informasi yang akurat, lengkap serta mudah didapatkan sangat membantu semua bagian untuk penyusunan rencana anggaran kegiatannya masing-masing yang pada akhirnya rekapitulasi dari rencana anggaran tersebut akan menjadi rencana anggaran untuk satuan kerja.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan membentuk dan menyusun bagian-bagian yang memudahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan untuk menjalankan rencana pengelolaan anggaran rutin. Struktur organisasi ini meliputi Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Kepala Bagian Program Data Organisasi dan SDM, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Masing-masing dari bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran rutin.

3. Pelaksanaan

Setelah proses perencanaan dan pengorganisasian dilakukan maka selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Sub variabel pelaksanaan dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat melalui prosedur, realisasi, SPJ dan laporan yang telah ditentukan oleh KPU pusat yang berada di Jakarta.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pengawasan maka jalannya pelaksanaan kegiatan suatu organisasi tidak dapat dinilai apakah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dalam bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan dan Inspektorat Pusat, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI.

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di atas, maka untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran rutin selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
 Pengelolaan Anggaran Rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 di Kota Makassar periode 2008-2012

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2008	1.915.398.000	1.721.111.266	194.286.734	89,86
2009	2.364.713.000	2.010.591.448	354.121.552	85,02
2010	4.819.815.000	2.572.562.113	2.247.252.887	53,37
2011	3.757.806.000	3.363.136.830	394.669.170	89,49
2012	7.397.468.000	4.169.729.539	3.227.738.461	56,37

Sumber : KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, anggaran rutin yang diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012) mengalami fluktuasi dan realisasi anggaran tidak pernah sama atau melebihi anggaran yang diterima. Terlihat pada tahun 2008, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran rutin sebesar Rp1.915.398.000 dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sehingga anggaran yang diterima sebesar Rp 2.364.713.000, hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran tahapan PILPRES. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan sehingga anggaran yang diterima sebesar Rp 4.819.815.000 hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 KPU Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan untuk memperbaiki gedung perkantoran akan tetapi gedung tersebut belum dapat diperbaiki karena gedung perkantoran yang ditempati oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih hak milik Pemerintah Kota Makassar. Pada tahun 2011 anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan sehingga anggaran yang diterima sebesar Rp 3.757.806.000 dan pada tahun 2012 anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar Rp 7.397.468.000 hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 KPU Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota serta layanan pengadaan pegawai baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai anggaran yang diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun terakhir (2008-2012). Berikut pembahasannya :

a) Anggaran Rutin Tahun 2008

Pada tahun 2008 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran sebesar Rp 1.915.398.000,- sedangkan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kegiatan kerja selama setahun sebesar Rp 1.721.111.266,-. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat efisiensi pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Anggaran Rutin}_{(2008)} &= \frac{\text{Rp } 1.915.398.000,-}{\text{Rp } 1.721.111.266,-} \\ &= 1,11 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa TE. AR sebesar 1,11 maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dikategorikan sangat efisien dalam mengelola anggarannya.

Dalam pelaksanaan program kegiatan utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar di tahun 2008 yang terdiri dari Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Program Perbaikan Proses Politik, Program Penerapan

Kepemerintahan yang baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan dan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari beberapa program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2008 yang disebutkan di atas semuanya terlaksana dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif dan efisien dalam mengelola anggaran rutinnya.

b) Anggaran Rutin Tahun 2009

Pada tahun 2009 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran sebesar Rp 2.364.713.000,- sedangkan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kegiatan kerja selama setahun sebesar Rp 2.010.591.448,-. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat efisiensi pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Anggaran Rutin}_{(2009)} &= \frac{\text{Rp } 2.364.713.000,-}{\text{Rp } 2.010.591.448,-} \\ &= 1,17 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa TE. AR sebesar 1,17 maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dikategorikan sangat efisien dalam mengelola anggarannya apabila semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program kegiatan utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar di tahun 2009 yang terdiri dari Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Program Perbaikan Proses Politik, Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan dan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari beberapa program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2009 yang disebutkan di atas ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana seperti :

- o Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPU dalam Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dikarenakan pada tahun 2009 tidak terdapat PAW karena anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPU baru saja terbentuk.
- o Belanja pegawai transito dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dikarenakan program ini tidak disetujui.
- o Standarisasi sarana dan prasarana dalam Program Peningkatan Aparatur dikarenakan program ini tidak disetujui.

Dari beberapa program yang tidak terlaksana di atas maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2009 dapat dikatakan kurang efektif dalam mengelola anggaran rutinnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin pada tahun 2009 tidak efisien dan tidak efektif.

c) Anggaran Rutin Tahun 2010

Pada tahun 2010 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran sebesar Rp 4.819.815.000,- sedangkan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kegiatan kerja

selama setahun sebesar Rp 2.572.562.113,-. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat efisien pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Anggaran Rutin}_{(2010)} &= \frac{\text{Rp 4.819.815.000,-}}{\text{Rp 2.572.562.113,-}} \\ &= 1,87 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa TE. AR sebesar 1,87 maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 dikategorikan sangat efisien dalam mengelola anggarannya apabila semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program kegiatan utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar di tahun 2010 yang terdiri dari Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Program Perbaikan Proses Politik, Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan dan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari beberapa program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2010 yang disebutkan di atas ternyata kegiatan pembangunan gedung kantor dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara tidak terlaksana karena gedung yang ditempati kantor KPU sekarang belum dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2010 dapat dikatakan kurang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin pada tahun 2010 tidak efisien dan tidak efektif.

d) Anggaran Rutin Tahun 2011

Pada tahun 2011 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran sebesar Rp 3.757.806.000,- sedangkan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kegiatan kerja selama setahun sebesar Rp 3.363.136.830,-. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat efisiensi pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Anggaran Rutin}_{(2011)} &= \frac{\text{Rp 3.757.806.000,-}}{\text{Rp 3.363.136.830,-}} \\ &= 1,17 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa TE. AR sebesar 1,17 maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dalam mengelola anggarannya apabila semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program kegiatan utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar di tahun 2011 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dari beberapa program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2011 yang disebutkan di atas ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana seperti :

- Layanan pengadaan pegawai baru dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dikarenakan pada tahun 2011 tidak ada perekrutan PNS baru.
- Pergantian Antar Waktu dalam Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dikarenakan pada tahun 2011 tidak terdapat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bermasalah atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2011 dapat dikatakan kurang efektif dalam mengelola anggaran rutinnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin pada tahun 2011 tidak efisien dan tidak efektif.

e) Anggaran Rutin Tahun 2012

Pada tahun 2012 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggaran sebesar Rp 7.397.468.000,- sedangkan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kegiatan kerja selama setahun sebesar Rp 4.169.729.539,-. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat efisiensi pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Anggaran Rutin}_{(2012)} &= \frac{\text{Rp } 7.397.468.000,-}{\text{Rp } 4.169.729.539,-} \\ &= 1,77 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa TE. AR sebesar 1,77 maka pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 dikategorikan sangat efisien dalam mengelola anggarannya apabila semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program kegiatan utama KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar di tahun 2012 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dari beberapa program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2012 yang disebutkan di atas ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana seperti :

- Layanan pengadaan pegawai baru dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dikarenakan pada tahun 2012 tidak ada perekrutan PNS baru.
- Seleksi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dikarenakan pada tahun 2012 masa jabatan anggota KPU belum habis dan tidak ada anggota KPU yang mengundurkan diri sehingga seleksi anggota KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota tidak terlaksana.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran rutin KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar tahun 2012 dapat dikatakan kurang efektif dalam mengelola anggaran rutinnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin pada tahun 2012 tidak efisien dan tidak efektif.

Secara keseluruhan dari analisis pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran rutin tidak efisien dan tidak efektif walaupun dalam menggunakan anggaran rutinnya selama lima tahun terakhir tidak sama atau tidak melebihi anggaran yang diterima. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa program kegiatan yang belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar sudah cukup baik, hanya ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih harus diperbaiki lagi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kesimpulan peneliti yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan masih menunjukkan beberapa kelemahan dalam hal pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan anggaran dan masih kurang tepat waktu dalam pengusulan rencana kerja.
2. Struktur organisasi pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah bagus karena orang-orang yang ada dalam bagian struktur organisasi telah tepat dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pada mereka.
3. Pelaksanaan pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik dikarenakan ada beberapa program kegiatan yang belum terlaksana.
4. Pengawasan pengelolaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah berjalan dengan baik, dalam hal pelaksanaan pengawasan internal dan pelaksanaan pengawasan eksternal. Begitu juga dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh tim Inspektorat KPU maupun BPK RI sudah sangat bagus.

Saran

Agar pengelolaan anggaran rutin dapat berjalan dengan baik, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah :

1. Perencanaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk pengumpulan data dan informasi sebaiknya dilaksanakan sebelum waktu yang ditetapkan sehingga data yang dibutuhkan dapat terkumpul tepat waktu. Dan kerjasama antar unit kerja dalam hal pembuatan rencana kerja agar lebih ditingkatkan sehingga usulan-usulan kegiatan semuanya bisa tertampung dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pengorganisasian pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan perlu dijaga dan ditingkatkan kerjasama dan kekompakan dalam melaksanakan tugas-tugas karena setiap bagian memiliki ikatan kerjasama satu sama lain dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi.
3. Pelaksanaan anggaran rutin pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam hal realisasi anggaran sebaiknya dari awal tahun anggaran yang terblokir diperhatikan dan dipertanyakan ke KPU Pusat sehingga tidak ada lagi anggaran yang masih terblokir pada akhir tahun dan realisasi anggaran dapat tercapai. Sedangkan dalam hal penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan, mungkin sebaiknya pada saat pengambilan uang muka, harus ditentukan *deadline* waktu berapa hari setelah kegiatan harus segera diSPJkan agar penggantian UP dapat berjalan lancar.
4. Dalam hal pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, semua temuan dari tim pemeriksa sebaiknya segera ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran bagi pengelola keuangan agar ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*.
Anonim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *tentang Perbendaharaan Negara*.

- Anonim. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Anonim. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969. *tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Bukhori, Imam. 1972. *Keuangan Daerah*. Jakarta : Gunung Agung.
- Djamaluddin, Arief. 1982. *Keuangan Daerah*. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Erwinnote. 2011. <http://erwinnote.com/2011/pengertian-dan-fungsi-anggaran/>. Di akses pada tanggal 30 Oktober 2012.
- Mamesah, D. J. 2000. *Manajemen Keuangan Daerah Otonom*. Makassar.
- Pamudji, S. 1985. *Pengelolaan Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Tjipta Karya.
- Putra, Zulfikar. 2011. <http://zulfikarputra.com/2011/pengertian-pengelolaan/>. Di akses pada tanggal 30 Oktober 2012.
- Reksopoetranto, Soemardi. 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soejadi, F.X. 1997. *Pengantar Akuntansi Manajemen*. Jakarta : BPF, Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : C.V. Alfabeta.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suparmoko, M. 1985. *Keuangan Negara*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Terry, R. George. 1960. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung : Alumni.
- Terry, G. R. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wirasaputra. 1979. *Sistem Pengelolaan Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Balai Pustaka.